

PEMINDAHAN IBU KOTA DAN POTENSI KONEKTIVITAS PEMERATAAN EKONOMI

Muhammad Taufiq^{1,2}

¹ Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

² Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Corresponding Author: taufiqlangkat@students.itb.ac.id

ABSTRAK

Seiring berkembangnya pemahaman tentang wacana pemindahan ibu kota negara melalui kajian-kajian yang ada, diantara berbagai potensi positif yang ingin didapatkan dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya konektivitas pemerataan ekonomi. Selain untuk keseimbangan pembangunan wilayah, konektivitas lokasi tujuan sedapat mungkin agar mumpuni dalam menciptakan pemerataan ekonomi berkenaan konsep negara kepulauan. Tidak dipungkiri geliat perekonomian Indonesia berpusat pada Pulau Jawa, khususnya sekitaran Ibu Kota Jakarta dengan tingkat perkembangan pusat pertumbuhan skala nasional sangat tinggi jauh melampaui pulau-pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, maka pemindahan ibu kota sedapat mungkin agar mengacu pada konektivitas perekonomian sebagai pemicu dalam meningkatkan perekonomian pulau-pulau besar di Indonesia. Pertanyaan muncul bagaimana potensi konektivitas pemerataan ekonomi dalam rangka pemindahan Ibu Kota Indonesia. Artikel bertujuan menyajikan studi literatur yang menghasilkan pemahaman berkenaan hal tersebut sebagai pertimbangan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku literatur dan berita internet. Hasilnya menegaskan adanya peluang dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemindahan ibu kota dengan asumsi akan munculnya pusat-pusat pertumbuhan skala nasional baru di luar Pulau Jawa. Arus migrasi penduduk, investasi, konektivitas internal dan konektivitas eksternal menjadi unsur-unsur yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Kata kunci : konektivitas, pemerataan ekonomi, pemindahan ibu kota, Indonesia

ABSTRACT

Along with the development of understanding about the discourse of the relocation of Indonesia's capital city by existing studies, one of the various positive potentials to be obtained from this policy is the realization of the connectivity of economic equality. In addition to balancing regional development, the new location's connectivity should be as capable as possible in creating economic equality concerning its archipelagic concept of country. It is undeniable that Indonesia's economy is centered on Java island, especially around the Jakarta capital city, with a very high level of development as a center of national scale growth, far beyond the other large islands such as Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. In creating a more equitable economic growth, the relocation of the capital city should as much as possible refer to economic connectivity as a trigger in improving the economy of the large islands in Indonesia. A question arises how the potential of connectivity of economic equality in the context of relocation of Indonesia's capital city. The article aims to present a literature study producing an understanding regarding this matter for the consideration of stakeholders in decision making. This study uses a descriptive and evaluative method with secondary data sources such as scientific journals, literature books, and internet news. Its result confirms the existence of an opportunity to create economic equality through the policy of the capital city relocation with the assumption that new growth centers of national scale will emerge outside Java. The flow of migration, investment, internal connectivity, and external connectivity are the elements making this happen.

Keywords: capital city relocation, connectivity, economic equality, Indonesia

PENDAHULUAN

Dewasa ini isu ketimpangan pembangunan antar wilayah di tanah air kian sering didengungkan. Tingginya disparitas pertumbuhan antar wilayah menjadi alasan

mengapa selalu ada gejolak di daerah-daerah. Ketimpangan perekonomian cenderung sebagai penyebab tingginya animo masyarakat untuk lebih konsen terhadap bagaimana menciptakan perekonomian yang lebih merata.

Mewujudkan pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia memang bukan hal yang mudah. Wilayah yang luas, terdiri dari berbagai pulau dan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda menjadikan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan ekonomi menjadi semakin rumit dan kompleks (Muchdie dkk., 2001).

Tipikal negara kepulauan berdampak pada pola pengembangan wilayah yang diterapkan di Indonesia menjadi berbeda dengan negara lainnya. Pengembangan wilayah yang dilakukan lebih tepat dengan pendekatan negara kepulauan, bukan pengembangan negara yang hanya terdiri dari satu daratan (Adisasmita, 2011).

Pengembangan negara kepulauan menjadi semakin kompleks karena perencanaannya dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan bertujuan untuk membangun suatu wilayah (pulau) menjadi terkoneksi, dengan secara bersamaan juga mewujudkan efek multiplier terhadap pulau lainnya.

Berkenaan hal tersebut, tidak disangkal bahwa sebagian besar perekonomian Indonesia berada di pulau Jawa (Firman, 2002; Nurzaman, 2002; Winarso & Firman, 2002). Alasan hal ini terjadi sebagai akibat dari posisi ibu kota negara di Jakarta (pulau Jawa) menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Apakah tingginya aktifitas perekonomian tersebut didorong oleh lokasi ibu kota, atautkah terjadi dengan sendirinya masih diperdebatkan. Namun secara logika, tentunya posisi dari ibu kota berdampak langsung dengan meningkatnya aktifitas perekonomian bagi wilayah disekitarnya. Hal ini didorong kemudahan administratif, pelayanan dan perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Isu pemerataan ekonomi dalam konteks pemindahan ibu kota menjadi urgensi tersendiri untuk dapat dipahami lebih lanjut. Artikel ini mempertanyakan bagaimana potensi konektivitas pemerataan ekonomi dalam rangka pemindahan Ibu Kota Indonesia? lebih lanjut Apakah dengan merelokasi ibu kota menjadi jawaban dalam mewujudkan pemerataan ekonomi atau tidak? Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap isu tersebut melalui kajian literatur, serta bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, juga sebagai pelengkap literatur berkenaan kajian sejenis bagi akademisi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kompleksitas Pemerataan Ekonomi

Implementasi pemerataan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari tingginya beban dalam pengelolaan ekonomi negara. Jumlah penduduk miskin, per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64 %), naik 6,90 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2016 yang sebanyak 27,76 juta orang (10,70 %), dimana hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 261.890,9 ribu orang (BPS, 2017). Jumlah penduduk miskin yang tinggi berdampak pada semakin besarnya upaya yang harus dilakukan dalam penanganannya. Setiap tahunnya angka kemiskinan meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk dan pengangguran. Hal ini diwaspadai sebagai dampak perkembangan ekonomi yang naik turun dan krisis ekonomi yang pernah melanda (Firman, 2002).

Berkenaan hal tersebut tingkat ketimpangan/ gini ratio bergerak stagnan. Gini ratio per Maret 2017 sebesar 0,393 (ketidakmerataan sedang), relatif stagnan dibandingkan pada September 2016 yang mencapai 0,394 atau turun tipis 0,001 poin (BPS, 2017). Ratio gini stagnan karena pertumbuhan orang kaya menurun dan pertumbuhan orang miskin pun melambat, kenaikan paling tinggi terjadi di masyarakat kelas menengah, bukan pada lapisan terkaya dan termiskin. Atau dengan kata lain jumlah kekayaan yang dihimpun oleh orang kaya semakin menurun, di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk miskin juga melambat, sehingga membuat jurang kesenjangan tidak banyak berubah (Sari, 2017)

Berdasarkan survei Tahun 2017 lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, menyampaikan bahwa 1 % orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 % kekayaan nasional. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia (peringkat 4 ketimpangan ekonomi). Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India dan Thailand. Dengan demikian terdapat disparitas/ perbedaan yang jauh antara yang kaya dan yang miskin (Credit Suisse International, 2017).

Variasi karakteristik masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat dan terletak pada kondisi geografis wilayah yang berbeda-beda (dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir). Penanganan ini berimplikasi pada pendekatan pengembangan masyarakat melalui perencanaan partisipatori yang cenderung menyesuaikan dengan norma masyarakat

bersangkutan (Prasetia, 2016). Perencanaan dilakukan melalui pelibatan seluruh elemen masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang disetujui oleh semua pihak (Djunaedi, 2014; Johansen & Chandler, 2015; Shalaby, 2013).

Rendahnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat, IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, dengan nilai indeks 0,686, turun dari posisi 110 nilai indeks 0,689 di 2016 (UNDP, 2016), pada tahun 2016, angka IPM Indonesia sebesar 70,18, tumbuh 0,91 % atau bertambah 0,63 poin dibandingkan Tahun 2015 (69,55), pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,93 % (BPS, 2017). Peningkatan IPM masih terkendala akibat distribusi harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk seluruh masyarakat tidak tersebar secara merata.

Cakupan luas wilayah yang besar, luas Indonesia 1.913.578,68 km², garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 di tahun 2015 (BPS, 2017). Semakin luas wilayah yang dikelola akan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan lebih memakan waktu, ditambah lagi luasan wilayah tersebut terdiri dari pulau-pulau. Cakupan wilayah negara yang terdiri dari kepulauan mengakibatkan pemerataan ekonomi cenderung terkendala oleh kondisi geografis, pusat-pusat pertumbuhan yang ada tidak serta merta berpengaruh untuk seluruh wilayah negara, namun terbatas pada pulau bersangkutan. Jarak terpanjang dari ujung paling Barat (Sabang) sampai ke ujung paling Timur (Jayapura) mencapai bentangan lebih dari 5.000 km atau sama jaraknya dari Seattle sampai ke

New York di Amerika Serikat. Dilihat dari aspek kewilayahan, Indonesia dapat diinterpretasikan terdiri dari daratan (pulau-pulau) yang dipisahkan dan dihubungkan oleh perairan (lautan), tetapi dapat dikatakan pula merupakan hamparan perairan (laut luas) yang ditaburi oleh pulau-pulau (daratan) (Adisasmita & Adisasmita, 2011).

Disparitas Antar Wilayah Kepulauan

Disparitas regional merupakan fenomena universal, di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya. Disparitas pembangunan merupakan masalah pembangunan antar-wilayah yang tidak merata. Pada banyak negara, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah politik. Hampir di semua negara, baik pada sistem perekonomian pasar maupun ekonomi terencana secara terpusat, kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah, maka dalam usaha peningkatan perekonomian terdapat adanya urgensi pembangunan antar wilayah secara berimbang (Friedmann, 1968; Nurzaman, 2012; Rustiadi, 2018; Sujarto, 2006).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia diantara negara berkembang termasuk yang sangat tinggi. Indeks ketimpangan tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat berimplikasi negatif dan cenderung mendorong timbulnya kecemburuan sosial daerah terbelakang terhadap daerah maju yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak politik bila tidak diatasi sesegera mungkin (Sjafrizal, 2014).

Tabel 1. Dampak Spasial terhadap Output, Pendapatan dan Kesempatan Kerja dari Kebijakan Peningkatan Ekspor Sektor Industri Nasional

No	Pulau	Output (Rp M)	Dampak Output ¹ (Rp M)	Persen	Pendapatan (Rp M)	Pendapatan ² (Rp M)	Persen	Tenaga Kerja (ribu)	Dampak tenaga kerja ³ (ribu)	Persen
1	Sumatera	80.437	16.034	19,9	12.185	1.838	15,1	14.093	2.777	19,7
2	Jawa	227.368	35.250	15,5	40.682	4.883	12,0	44.723	6.953	15,5
3	Kalimantan	27.254	8.001	29,4	5.388	1.259	23,4	3.935	1.182	30,0
4	Nusa Tenggara	11.298	587	5,2	2.467	90	3,6	5.897	298	5,1
5	Lainnya	21.962	3.839	17,4	4.973	648	13,0	5.587	1.076	19,3
	Total	368.320	63.702	17,3	65.695	8.717	13,3	74.235	12.286	16,6

¹Dampak output meningkatnya ekspor sektor industri sebesar 100%

²Dampak pendapatan meningkatnya ekspor sektor industri sebesar 100%

³Dampak kesempatan kerja meningkatnya ekspor sektor industri sebesar 100%

Sumber: Disadur dari Muchdie, 2001

Pembangunan antar pulau dapat dilihat dari investasi yang digelontorkan untuk daerah tersebut. Sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat menjadi Rp 75,3 triliun atau setara dengan 45,4% dari total investasi (dibanding Triwulan I 2016 yang hanya sebesar 44,9%), dimana realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 90,5 triliun (54,6%) (BKPM, 2017). Nilai investasi di suatu wilayah akan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut, hal ini akan mendorong perluasan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur dan menjadi idriver pembangunan kawasannya. BKPM (2017) juga mencatat bahwa realisasi investasi (Penanaman Modal Dalam Negeri/ PMDN+Penanaman Model Asing/ PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 29,3 Triliun, 17,7%); DKI Jakarta (Rp 24,2 Triliun, 14,6%); Jawa Timur (Rp 12,6 Triliun, 7,6%); Banten (Rp 12,4 Triliun, 7,4%) dan Jawa Tengah (Rp 11,9 Triliun, 7,2%). Dari uraian tersebut masih menunjukkan terdapat adanya ketimpangan antara investasi di pulau Jawa dan luar pulau Jawa yang signifikan.

Sejak zaman kolonial perekonomian Nusantara didominasi oleh Pulau Jawa, dilanjutkan masa Orde Lama dan dipertajam oleh masa Orde Baru. Ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai fasilitas sosial, budaya, ekonomi dan politik (Bresnan, 1998; Hill, 1994).

Muchdie dkk. (2001) menyampaikan bahwa lebih dari 60 % output total dalam perekonomian Indonesia terkonsentrasi di Jawa, sekitar 20 % di Sumatera dan sisanya (sekitar 10 %) di Kawasan Timur Indonesia (Tabel 1). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pulau Jawa merupakan pusat pertumbuhan skala nasional yang ditandai dengan tingginya aktifitas output total perekonomian negara, serta ditunjang dengan tingginya angka investasi yang digelontorkan untuk wilayah tersebut.

Data tersebut memberikan esensi bahwa perekonomian terkonsentrasi di Pulau Jawa yang berimplikasi pada alokasi sumber daya (SDM dan SDA) menuju daerah tersebut akibat dari kegiatan ekonomi terpusat. Namun disadari bahwa wilayah negara yang luas dan terdiri dari pulau-pulau mestinya angka persentase output dapat disebar pada pulau-pulau lainnya, sehingga pulau Jawa tidak dipenuhi oleh arus urbanisasi dan tenaga kerja lokal di luar pulau Jawa dapat membangun daerahnya masing-masing.

Pembangunan ekonomi menekankan azas pemerataan dalam melakukan pengembangan

wilayah. Namun tampaknya hal ini tidak berjalan mulus dilihat dari adanya ketimpangan perekonomian antar pulau yang ada. Pengembangan perekonomian Indonesia tidak hanya memperhatikan wilayah tertentu tanpa memperdulikan daerah lainnya, karena kalau ditinggalkan maka terjadi ketidakadilan di masyarakat. Adapun pembahasan pada makalah ini lebih kepada potensi relokasi ibukota, apakah mampu menjadi trigger dalam meningkatkan perekonomian kota tujuan sembari mewujudkan pemerataan ekonomi agar perekonomian Indonesia tidak hanya didominasi oleh pulau Jawa dan terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pulau Jawa agar nantinya mampu mengimbangi kemajuannya.

Penanganan disparitas perekonomian antar wilayah dapat dilakukan melalui konsep pengembangan wilayah dengan tujuan memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah (Mahi, 2016; Setiono & Setiyono, 2010; Tarigan, 2012). Dalam pembahasan ini, relokasi ibu kota dijadikan alat (kebijakan) pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah yang dilakukan tentunya mengidentifikasi relokasi ibu kota menuju wilayah yang paling efektif mendatangkan keuntungan tertinggi negara untuk mendistribusikan perekonomian khususnya bagi daerah luar pulau Jawa, sehingga menstimulus pemerataan ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi literatur dengan sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku literatur dan berita internet. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif evaluatif (Neuman, 2014). Metode ini berupaya memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan sosial yang diperbincangkan dengan argumen yang lebih beralasan. Setelah data dikumpulkan, pengelolaannya dimulai dari interpretasi awal melalui pemaparan fakta empiris dengan mengelaborasi data dan gagasan dari literatur terkait. Selanjutnya dilakukan interpretasi terfokus yang didasarkan pada pemaparan data tersebut. Fase ini menghasilkan tinjauan yang lebih spesifik sebagai landasan argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun fokus kajian yang diamati antara lain (1) kompleksitas pemerataan ekonomi; (2) disparitas antar wilayah kepulauan; (3) kontekstual wacana pemindahan ibu kota; dan (4) potensi konektivitas pemerataan ekonomi. Fase akhir dilakukan dengan

pengambilan kesimpulan yang menghasilkan jawaban utama terhadap pertanyaan penelitian. Sebagaimana kajian ini dibangun melalui pendekatan kualitatif (Creswell, 2014), maka subyektifitas penulis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontekstual Wacana Pemindahan Ibu Kota

Wacana Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju tempat lainnya telah mulai dibahas sekitaran tahun 2010. Banyak pendapat yang melatarbelakangi hal ini, diantaranya kondisi Jakarta pada saat ini sudah tidak representatif lagi untuk menjadi ibu kota negara diakibatkan alasan lingkungan seperti tingkat kemacetan yang serius, jumlah dan kepadatan penduduk, hingga daya dukung, banjir dan equity (alasan pemerataan).

Tingkat kemacetan Jakarta sudah sangat serius, hal ini mempengaruhi aktivitas kinerja masyarakat, tingkat stress penduduk dan menurunnya produktifitas. Diantara waktu-waktu yang biasanya terjadi kemacetan yakni di saat aktifitas perkantoran dimulai/ pergi kantor (masuk kantor sekitar pukul 07.00 WIB s.d. 09.00 WIB), istirahat makan siang (12.00 WIB-13.00 WIB) dan saat pulang kantor (16.00 WIB s.d 17.00 WIB) Ditambah lagi dengan tingginya intensitas kemacetan di seputar tol kawasan Jakarta. Kemacetan di Jakarta memiliki karakteristik tersendiri, terdapat pengaruh kemacetan yang didorong oleh kondisi hujan. Jika dikaitkan dengan kondisi pada waktu hujan, maka hal ini menyebabkan jalan tol dan jalan protokol cenderung lebih cepat menjadi macet seperti halnya perempatan Cengkareng arah ke Pesing, Km 4 Tol Pancoran arah Semanggi, di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, Cipete arah Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan, Jalan Mayjen Soetoyo arah Pancoran, Jalan Raya Pabrik Acid di Bekasi,

Jalan Raya Condet arah Jalan Dewi Sartika dan Jalan MT Haryono, serta Jalan Boulevar Barat Kelapa Gading (TMC Polda Metro Jaya, 2017).

Baru-baru ini Tom-Tom Traffic melakukan survey tingkat kemacetan pada kota-kota di dunia, menempatkan Jakarta pada urutan ke-3 dari 189 kota paling macet di dunia. Di urutan teratas, ada kota Meksiko lalu disusul urutan kedua yakni Bangkok. Jakarta diberitakan memiliki level kemacetan sebesar 58 %, dengan puncak kemacetan yang terjadi pada saat pagi (91 %) dan malam (95 %) (tomtom.com, 2017) (Gambar 1).

Tren pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi melonjak dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk disumbangkan oleh angka kelahiran dan faktor lain yang sangat memegang peranan, yakni tingkat urbanisasi (Pontoh & Kustiwan, 2009). Anggapan untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih mudah menjadi salah satu pemicu mengapa banyak masyarakat daerah berbondong-bondong datang ke Ibu Kota. Jakarta diibaratkan suatu kota yang dipenuhi oleh jumlah penduduk dengan batas akut karena mengemban limpahan penduduk dari pulau lainnya (pengaruh kondisi sebagai pusat pertumbuhan tingkat nasional), yang berimplikasi pada berkurangnya daya dukung lingkungan.

Jakarta memiliki luas wilayah daratan 661,52 km² dengan jumlah penduduk 10.177.924 dan kepadatan penduduk 662,33/km² (BPS, 2017). Tingginya kepadatan penduduk mendatangkan bermacam masalah, diantaranya meningkatkan jumlah pengangguran, karena penduduk semakin bertambah sementara kesempatan kerja tidak bertambah, dibarengi juga dengan adanya arus urbanisasi. Di sisi lain juga mengakibatkan kemiskinan yang berdampak pada hal lain seperti kelaparan, menurunnya tingkat kesehatan, dan menurunnya kualitas masyarakat (quality of life).



Gambar 1. Survey Tingkat Kemacetan Kota-Kota Dunia
Sumber: Tom-Tom Traffict, 2017

Penanganan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan urbanisasi dapat diatasi dengan melakukan pemerataan lapangan kerja. Pemerataan lapangan kerja dilakukan dengan mengembangkan industri, pertanian, perkebunan, petambakan dan perikanan di wilayah yang lain. Dengan upaya ini diharapkan penduduk tidak terfokus untuk mencari pekerjaan di satu wilayah saja. Hal ini berhubungan dengan relokasi ibu kota yang akan berdampak pada penyebaran penduduk sehingga tidak berpusat di pulau Jawa, karena relokasi tersebut akan serta merta membawa dampak untuk mewujudkan pusat pertumbuhan tingkat nasional baru.

Daya dukung lingkungan tergerus oleh kepadatan penduduk, aktifitasnya dan bangunan, menjadi dampak tersendiri akibat dari tingginya populasi di Jakarta. Semakin banyaknya pembangunan seperti gedung pencakar langit, pertokoan, rumah penduduk, industri, pasar, hotel, apartemen dan pabrik, berdampak pada daya dukung lingkungan yang terus berkurang. Berdampak juga pada ruang terbuka perkotaan yang bertambah sempit, daya dukung air dan pengelolaan limbah yang meningkat. Pembangunan gedung-gedung dan bangunan bertingkat tinggi dalam jumlah besar akan berdampak pada daya dukung lahan, yang terdiri dari lapisan tanah dan pencemaran hingga pemanasan global.

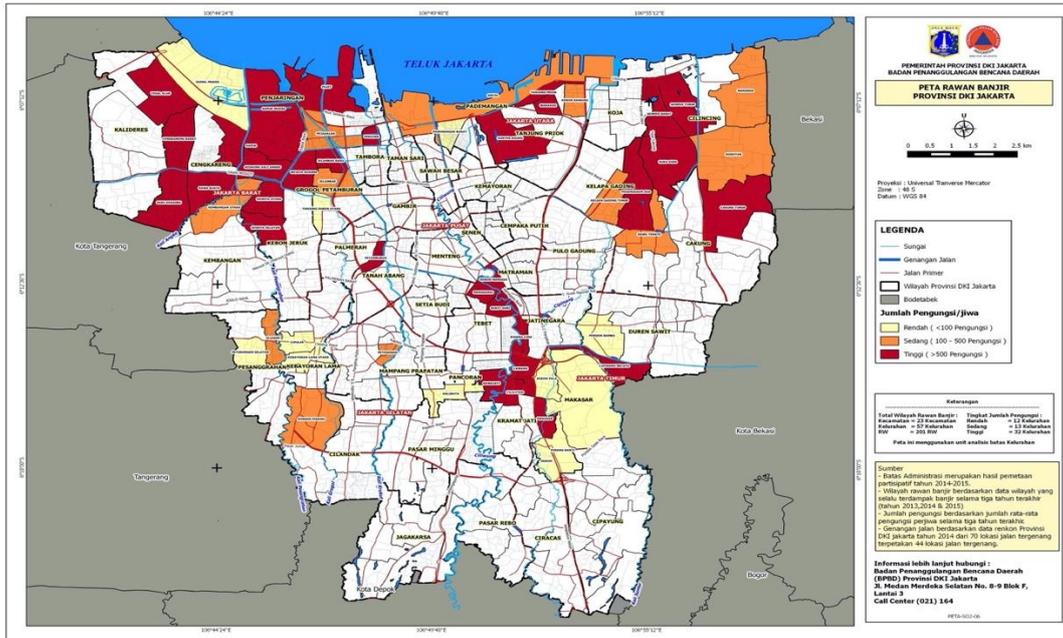
Perlunya perhatian dan perhitungan terhadap daya dukung lahan yang menjadi lokasinya serta jenis lapisan tanah dan batuan-batuan di bawahnya, jika tidak diperhatikan maka berdampak pada intrusi air laut yang

memiliki kandungan garam yang tinggi, dapat membuat keropos lapisan bebatuan hingga fondasi gedung/ bangunan yang tinggi terperosok masuk tanah lebih dalam (Adisasmita & Adisasmita, 2011).

Eksplorasi tanah secara besar-besaran berdampak pada penurunan permukaan tanah. “Sebagai contoh di Jl. H. M. Thamrin dan Jl. Jenderal Sudirman dan sekitarnya banyak sekali gedung bertingkat tinggi melakukan penyedotan air bawah tanah dalam volume yang sangat besar, maka tidak mengherankan permukaan tanah di dua daerah tersebut mengalami penurunan yang cukup berarti (Gedung Sarinah dan BPPT mengalami retak-retak)” (Adisasmita, 2011). Penurunan muka tanah yang terus terjadi hampir pada sebagian besar wilayah DKI Jakarta salah satunya ditengarai oleh kegiatan eksploitasi air tanah. Hasil penelitian pada tahun 2012, bahwa penyebab penurunan tanah karena pengambilan air tanah berkontribusi 5 - 19 % (terbesar di daerah rawa buaya, kali deres, cengkareng dan sekitarnya). Sedangkan penyebab utama adalah konsolidasi/ kondisi alamiah batuan/ tanah setempat dan beban bangunan sebesar 30-60 %. Walaupun aspek pengambilan air tanah bukan hal utama penurunan tanah di Jakarta, tetapi kegiatan ini harus menjadi perhatian dalam kebijakannya karena selain kondisi air tanah Jakarta yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitasnya, juga kegiatan pengambilan air tanah pada dasarnya harus dikendalikan (Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI Jakarta, 2013) (Gambar 2).

keluarganya berjumlah 4 orang, maka akan ada 1,6 juta jiwa yang akan pindah menuju lokasi ibu kota baru, diperkirakan dengan jumlah tersebut sudah dapat menjadi satu kota mandiri (Brodjonegoro dalam kompas.com, 2017). Perkiraan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp. 100 triliun dengan selang waktu penganggaran 10 tahun dengan harapan menjadikannya sebagai

investasi bangsa untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Memerlukan kesiapan daerah tujuan, dalam memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pangan, sandang dan papan, serta kesediaan penduduk dan etnis lokal untuk dapat berinteraksi positif menuju masyarakat metropolitan yang pluralis.



Gambar 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peta Rawan Banjir Pemprov DKI Jakarta Berdasarkan Kejadian Tahun 2013, 2014 dan 2015.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, 2017

Pengembangan wilayah skala besar akan terjadi, lokasi sekitar wilayah pembangunan perlahan-lahan akan menjadi lahan non pertanian yang lebih produktif sebagai penunjang pembangunan dan perluasan kompleks Kepresidenan, DPR, Yudikatif, Mahkamah Agung, Kementerian/ Lembaga. Pembangunan perkantoran pemerintahan akan diikuti oleh pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, transportasi, bandara internasional, perumahan, pertokoan, perdagangan, pasar dsb. Di sisi lain potensi ekspansi ranah industri juga akan bertolak menuju daerah pertumbuhan baru sehingga mengurangi dominasi pulau Jawa.

Dari sisi dampak sosial kemasyarakatan yang akan terjadi adalah akan membentuk masyarakat metropolitan pluralis. Penduduk lokal harus siap dengan situasi tersebut, terjadi pertukaran budaya (kultur) karena norma-norma yang ada selama ini dapat saja berintegrasi

dengan masyarakat yang lebih pluralis (bercampur) membentuk norma yang lebih berwawasan keanekaragaman yang ber-bhinneka tunggal ika.

Dalam hal ini penulis memprediksikan untuk memenuhi aspek kesetaraan, maka dengan bentuk negara kepulauan tersebut diperlukan relokasi pusat pemerintahan bukan hanya sekali, namun berkali-kali hingga setiap daerah yang dilaluinya sebagai pusat pemerintahan meningkatkan pertumbuhannya menyamai Jakarta dan sebagai pusat pertumbuhan utama pulau tersebut.

Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi

Pusat pertumbuhan nasional merupakan kawasan yang memiliki fungsi khusus dalam hal meningkatkan perekonomian suatu negara, disana terdapat pusat perdagangan, jasa, bisnis maupun industri berskala nasional. Pusat pertumbuhan ini mendorong perekonomian suatu

negara dengan memfasilitasi daerah sekitarnya (cenderung berdampak hanya bagi wilayah berbatasan daratan) dalam hal perekonomian.

Setiap negara mempunyai pusat pertumbuhan ekonomi skala nasionalnya masing-masing. Keunikan yang terjadi di Indonesia adalah meskipun terdiri dari pulau-pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) namun pusat pertumbuhan berskala

nasionalnya hanya terdapat di Jakarta (pulau Jawa). Hal ini dapat dilihat dari besaran output ekspor (*output* total perekonomian) dan investasi yang cenderung sebagian besar ada di pulau Jawa (pembahasan sebelumnya). Implikasi dari kondisi tersebut terjadinya ketergantungan bukan hanya terhadap daerah sekitarnya namun juga terhadap daerah dari pulau-pulau di luarnya.

Tabel 2. Negara-Negara yang Pernah Melakukan Relokasi Ibu Kota

No	Negara	Tahun	Lokasi Asal	Lokasi Baru	Alasan
1	Pantai Gading	1983	Abidjan	Yamoussoukro	Mendongkrak pembangunan di wilayah tengah negara
2	Inggris	1066	Winchester	London	Mendongkrak pembangunan wilayah
3	Australia	1927	Melbourne	Canberra	Memisahkan pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan
4	India	1991	Delhi	New Delhi	Memisahkan pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan
5	Rusia	1918	St. Petersburg	Moskow	Identitas negara
6	Brasil	1960	Rio de Janeiro	Brasillia	Memisahkan pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan
7	Nigeria	1991	Lagos	Abuja	Kepadatan penduduk dan mendongkrak pembangunan wilayah
8	Myanmar	2005	Yangoon	Naypyidau	Mendongkrak pembangunan wilayah
9	Kazakhstan	1997	Almaty	Astana	Terlalu sempit, rawan gempa, serta berlokasi terlalu dekat dengan negara lain, tidak punya ruang untuk berkembang, untuk efektivitas pelayanan dan kinerja
10	Pakistan	1959	Karachi	Islamabad	Efektivitas pelayanan dan mendongkrak pembangunan wilayah
11	Amerika Serikat	1800	New York	Washington DC	Memisahkan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan, serta mewujudkan spesifikasi sektor unggulan wilayah
12	Malaysia	1995	Kuala Lumpur	Putrjaya	Kepadatan penduduk, kemacetan, memisahkan pusat pertumbuhan dan pusat pemerintahan, untuk efektivitas pelayanan dan kinerja
13	Argentina	1987	Boenos Aires	Viedma	Memisahkan pusat pemerintahan dan kinerja
14	Jepang	1990	Tokyo	Tokai/ Hokuto/ Mie-Kio	Tekanan politik dan ekonomi yang berlebihan serta memisahkan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan

Sumber: kompas.com, 2017

Idealnya pusat pertumbuhan berskala nasional terdapat juga di lokasi tertentu pada pulau-pulau besar lainnya, sehingga tidak terdapat ketergantungan yang berlebihan terhadap pulau Jawa. Untuk mewujudkan agar setiap pulau-pulau besar memiliki pusat pertumbuhannya masing-masing, hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, dengan pertimbangan keterbatasan biaya dan sumber daya manusia yang ada. Hal ini perlu untuk dimulai, bukan karena takut gagal, namun lebih kepada investasi jangka panjang untuk

pemerataan dan konektivitas pemerataan ekonomi.

Pada pembahasan ini, relokasi ibu kota memungkinkan adanya pusat pertumbuhan nasional baru dengan harapan lokasi tujuan akan berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi motor perekonomian baru selain di Jakarta. Menilik kepada kasus-kasus pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, memberikan gambaran tersendiri terhadap pentingnya relokasi ibu kota berlandaskan berbagai pertimbangan (Tabel 2). Alasan yang

paling umum relokasi ibu kota adalah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan memisahkan antara pusat pertumbuhan nasional dengan pusat pemerintahannya.

Dari tabel tersebut sebagian besar negara-negara yang telah melakukan relokasi ibu kotanya memiliki latar belakang tujuan untuk memisahkan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan nasionalnya dengan alasan kota sebelumnya memiliki beberapa kendala diantaranya kemacetan, pengaruh politik, sosial dan ekonomi yang berlebihan (stabilitas), kepadatan penduduk, keterbatasan areal lahan untuk pengembangan serta untuk memajukan dan mendongkrak perekonomian wilayah bagian negara.

Alasan relokasi ibu kota Indonesia dengan tujuan mendongkrak perekonomian wilayah bagian negara sangat tepat bagi Indonesia karena akan membawa dampak positif bagi lokasi tujuan, perhatian perekonomian akan tertuju kepadanya, disertai dengan invertasi dan munculnya pusat pertumbuhan berskala nasional baru. Disisi lain juga daerah tujuan harus siap dengan eksternalitas yang ada, baik positif maupun negatif. Kota tersebut akan tumbuh sebagai kota metropolitan yang pluralis.

Pemerataan ekonomi dimaksudkan bahwa dengan adanya relokasi ibu kota merdampak pada kecenderungan urbanisasi ke pulau Jawa akan menurun, arus urbanisasi akan terfokus ke ibu kota baru. Fokus pencarian lapangan kerja akan teralihkan dengan pola perubahan arah pergerakan urbanisasi yang baru. Hal ini didasari akan pembangunan infrastruktur, perpindahan aparatur kementerian/ lembaga pemerintahan, kesempatan kerja dan tumbuhnya pusat bisnis.

Idealnya pusat pertumbuhan berskala nasional terdapat juga di lokasi tertentu pada pulau-pulau besar lainnya, sehingga tidak terdapat ketergantungan yang berlebihan terhadap pulau Jawa. Untuk mewujudkan agar setiap pulau-pulau besar memiliki pusat pertumbuhannya masing-masing, hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah, dengan pertimbangan keterbatasan biaya dan sumber daya manusia yang ada. Hal ini perlu untuk dimulai, bukan karena takut gagal, namun lebih kepada investasi jangka panjang untuk pemerataan dan konektivitas pemerataan ekonomi.

Pada pembahasan ini, relokasi ibu kota memungkinkan adanya pusat pertumbuhan nasional baru dengan harapan lokasi tujuan akan berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi

motor perekonomian baru selain di Jakarta. Menilik kepada kasus-kasus pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, memberikan gambaran tersendiri terhadap pentingnya relokasi ibu kota berlandaskan berbagai pertimbangan. Alasan yang paling umum relokasi ibu kota adalah untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan memisahkan antara pusat pertumbuhan nasional dengan pusat pemerintahannya.

Dari tabel tersebut sebagian besar negara-negara yang telah melakukan relokasi ibu kotanya memiliki latar belakang tujuan untuk memisahkan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan nasionalnya dengan alasan kota sebelumnya memiliki beberapa kendala diantaranya kemacetan, pengaruh politik, sosial dan ekonomi yang berlebihan (stabilitas), kepadatan penduduk, keterbatasan areal lahan untuk pengembangan serta untuk memajukan dan mendongkrak perekonomian wilayah bagian negara.

Alasan relokasi ibu kota Indonesia dengan tujuan mendongkrak perekonomian wilayah bagian negara sangat tepat bagi Indonesia karena akan membawa dampak positif bagi lokasi tujuan, perhatian perekonomian akan tertuju kepadanya, disertai dengan invertasi dan munculnya pusat pertumbuhan berskala nasional baru. Disisi lain juga daerah tujuan harus siap dengan eksternalitas yang ada, baik positif maupun negatif. Kota tersebut akan tumbuh sebagai kota metropolitan yang pluralis.

Pemerataan ekonomi dimaksudkan bahwa dengan adanya relokasi ibu kota merdampak pada kecenderungan urbanisasi ke pulau Jawa akan menurun, arus urbanisasi akan terfokus ke ibu kota baru. Fokus pencarian lapangan kerja akan teralihkan dengan pola perubahan arah pergerakan urbanisasi yang baru. Hal ini didasari akan pembangunan infrastruktur, perpindahan aparatur kementerian/ lembaga pemerintahan, kesempatan kerja dan tumbuhnya pusat bisnis.

Pemindahan ibu kota akan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru karena wilayah sekitar ibu kota akan menjadi sumber mata pencaharian sendiri, bukan hanya bagi penduduk lokal, namun penduduk nasional dan internasional. Karena secara sistematis akan dibangun sarana, prasarana atau infrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah seperti istana kepresidenan, kementerian, perkantoran, perhotelan, pemukiman, infrastruktur, infrastruktur jalan, transportasi, bandara internasional, pasar, pusat industri, jasa,

perdagangan dsb. Penyerapan tenaga kerja akan booming, tenaga kerja akan berdatangan dari berbagai penjuru negeri hingga akhirnya membentuk sistem jaringan pergerakan dengan motif ekonomi baru.

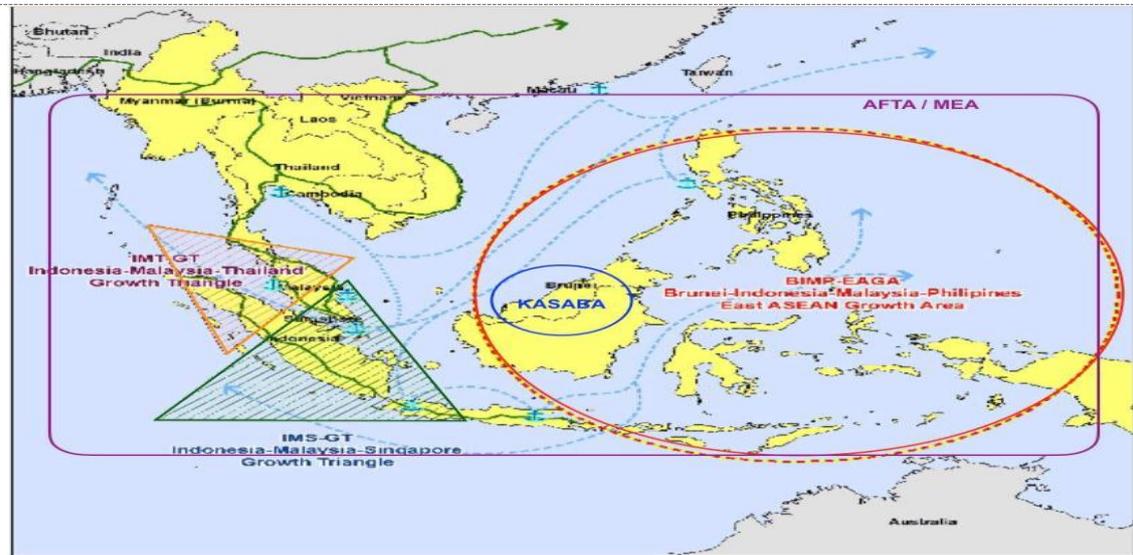
Relokasi ibu kota diharapkan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi, serta penentuan lokasi tujuan sedapat mungkin memenuhi nilai-nilai konektivitas antar pulau, baik konektivitas internal maupun konektivitas eksternal negara. Pemerataan ekonomi disini dimaksudkan dengan adanya relokasi, maka akan ada kesempatan bagi wilayah kepulauan lainnya untuk dapat meningkatkan perekonomiannya dengan lebih besar lagi. Adapun wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, maka secara geoekonomi berdampak pada kemajuan ekonomi wilayah sekitarnya khususnya pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Proyek berskala nasional dengan sendirinya akan dikembangkan pada dua wilayah tersebut untuk mewujudkan lokasi industrialisasi, bisnis dan perdagangan yang lebih berkembang.

Konektivitas internal dimaksudkan dengan adanya relokasi ibukota mewujudkan integrasi ekonomi antar pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Kota tujuan ibu kota dijadikan sebagai pendorong kemajuan perekonomian lokasinya hingga mewujudkan pusat pertumbuhan tingkat nasional baru dan adanya konektivitas pulau-pulau disekitarnya dalam distribusi perekonomian, baik melalui jalur darat maupun jalur laut yang lebih terintegrasi.

Teori Christaller tentang tempat sentral salah satunya menyatakan bahwa penduduk serta daya belinya tersebar merata di seluruh wilayah serta konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimasi jarak (Christaller, 1966). Konektivitas disini dimaksudkan dengan prinsip meminimasi jarak, yang artinya relokasi ibu kota

dapat memperpendek jarak pelayanan khususnya bagi lokasi tujuan (misalnya Palangkaraya di pulau Kalimantan) sehingga segala bentuk aktifitas ekonomi khususnya khususnya bagi lokasi tujuan akan mendatangkan keuntungan tersendiri. Relokasi ibu kota akan bersamaan dengan arus urbanisasi yang mengakibatkan tingginya tingkat konsumsi dan permintaan. Berkenaan hal tersebut relokasi ibu kota dengan sendirinya akan membentuk kawasan pertumbuhan baru karena dengan adanya permintaan maka akan menimbulkan penawaran dalam bentuk usaha-usaha seperti pasar, pertokoan hingga industri. Lebih jauh konektivitas ini bukan hanya berdampak pada pulau Kalimantan namun juga pada pulau di sekitarnya seperti Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua hingga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina. Konektivitas yang lebih dekat akan memberi dampak pemerataan ekonomi yang lebih tinggi lagi bagi pulau-pulau lain di luar Jawa.

Kebijakan dengan sengaja menyalurkan pertumbuhan ke tempat-tempat tertentu yang disukai untuk mencapai tujuan regional atau nasional yang lebih luas sekarang dianjurkan dan dipraktekkan di berbagai negara, selanjutnya tempat-tempat tersebut akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan sendiri (McCann, 2013; O'Sullivan, 2012; Arnot dan McMillan, 2006; Moseley, 1974) (Arnot & McMillan, 2008; McCann, 2013; Moseley, 2013; O'Sullivan, 2011). Potensi besar terbentuknya pusat-pusat industri berskala nasional baru akan terjadi seiring dengan adanya relokasi ibu kota, karena misi ini sedianya bukan dilakukan hanya untuk memisahkan busat bisnis dengan pusat pemerintahan, namun lebih jauh dari itu yakni untuk pemerataan ekonomi dan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan berskala nasional baru.



Gambar 4. Konektivitas Hubungan Kerjasama Internasional antar Indonesia dengan Negara Tetangga

Perroux melalui teori kutub pertumbuhannya menyampaikan bahwa inti pokok dari pertumbuhan wilayah terletak pada inovasi-inovasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan atau industri-industri berskala besar dan terdapatnya ketergantungan antar perusahaan atau industri, unit-unit ekonomi berskala besar dapat mendominasi pengaruh-pengaruhnya terhadap ekonomi lainnya, dengan demikian adanya kaitan erat antara skala perusahaan, dominasi, dan dorongan untuk melakukan inovasi (Perroux dalam Adisasmita, 2008).

Konektivitas eksternal dimaksudkan dengan adanya relokasi ibu kota akan meningkatkan kerjasama negara dengan negara tetangga maupun negara lainnya, seperti halnya memaksimalkan aktivitas ekonomi dari kerjasama bilateral antar kawasan dalam kerja sama ekonomi diantaranya: (1) ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), (2) SIJORI Treangle (Singapore, Johor, Riau Islands), (3) BIMP EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines *East Asean Growth Area*), (4) IMT GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Treangle), dan (5) IMS GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Treangle*) (Gambar 4).

Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran investasi, industri, bisnis, perdagangan maupun pariwisata. Potensi keuntungan ini tidak dapat dipandang remeh,

posisi ibu kota yang berada lebih dekat dengan segi tiga pertumbuhan (Indonesia, Malaysia dan Singapura) membawa wawasan baru bagaimana aliran distribusi yang selama ini berporos di Singapura dapat dialihkan menjadi berada di pulau Kalimantan.

Relokasi ibu kota mendatangkan konektivitas sub-regional, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan kawasan kerja sama antar negara sehingga menjadi motor penggerak ekonomi, sementara pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Lebih jauh konektivitas sub-regional diharapkan dapat mendukung implementasi konektivitas regional di kawasan ASEAN sebagaimana ditulis dalam Masterplan Konektivitas ASEAN (kemenlu, 2017). Hubungan antar negara akibat adanya relokasi dipermudah karena meningkatkan kapasitas geostrategis dan geopolitik Indonesia. Karena pada dasarnya negara-negara tetangga yang posisinya berdekatan dengan Indonesia merupakan mitra dagang yang strategis.

Konektivitas ini sebagai salah satu instrumen kunci untuk menerapkan visi bersama mewujudkan berbagai kawasan dengan pola/fungsi tertentu, seperti perkebunan, pangan dan pusat ekowisata di ASEAN dan kawasan Asia lainnya.

Disisi lain kerja sama ini juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga eksternal, sebagai contoh pada penanganan

BIMP-EAGA, pengembangan kerja sama dibantu oleh adalah Asian Development Bank (ADB) sebagai mitra pembangunan dan penasihat regional, Jepang dan China sebagai mitra pembangunan dan Growth Triangle Zone (GTZ) sebagai mitra strategis, selain itu BIMP-EAGA juga telah bekerja sama dengan Northern Territory, Australia.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemindahan ibu kota berdampak pada potensi konektivitas pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan adanya relokasi ibu kota, karena menimbulkan konsentrasi pusat pertumbuhan ekonomi skala nasional baru, disertai dengan arus migrasi penduduk menuju lokasi tujuan. Dari sisi lokasinya, dengan adanya pemindahan ibu kota akan berdampak pada konektivitas internal dan eksternal seiring dengan perubahannya. Konektivitas internal memungkinkan pengembangan ekonomi akan mengarah pada pembangunan wilayah kepulauan terluar lain (selain pulau Jawa) seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Konektivitas eksternal akan berdampak lebih positif pada kerjasama luar negeri antar kawasan di Asia Tenggara, perhatian akan lebih fokus kepada segitiga pusat pertumbuhan seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura maupun antara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.

Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran investasi dan pariwisata. Meskipun di sisi lain relokasi ibu kota bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena pada akhirnya akan menginginkan integrasi antara penduduk lokal dengan pendatang yang berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi, baik dalam bentuk eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif untuk menuju masyarakat metropolitan pluralis.

Penulis merekomendasikan untuk kajian selanjutnya terkait dengan prediksi, bahwa adanya relokasi ibu kota yang menimbulkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, tinjau dari sisi kajian yang berbeda seperti potensi-potensi yang tidak menyebabkan stimulasi peningkatan ekonomi bagi daerah sekeliling tujuan lokasi relokasi, ataupun sisi negatif dari pertumbuhan ekonomi akibat relokasi ibu kota.

Catatan Penulis

Gagasan artikel ini sebelumnya disajikan pada Seminar Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, kerja sama antara Pemerintah Kota Palangkaraya dan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Palangkaraya, 15 Desember 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2008). Pengembangan wilayah: Konsep dan teori. Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2011). Pembangunan kelautan dan kewilayahan. Graha Ilmu.
- Adisasmita, R., & Adisasmita, S. A. (2011). Logika pemindahan ibukota Jakarta. Graha Ilmu.
- Arnott, R. J., & McMillen, D. P. (2008). A Companion to Urban Economics. John Wiley & Sons.
- BKPM. (2017). Realisasi investasi triwulan I. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- BPS. (2017). Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi November 2017. Badan Pusat Statistik.
- Bresnan, J. (1998). The Indonesian Economy Since 1996: Southeast Asia's Emerging Giant. JSTOR.
- Christaller, W. (1966). Central Places in Southern Germany. Prentic-Hall.
- Credit Suisse International. (2017). Di Indonesia, 1% Orang Terkaya Menguasai 49% Kekayaan Nasional. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/10/di-indonesia-1-orang-terkaya-menguasai-49-kekayaan-nasional>
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE.
- Djunaedi, A. (2014). Pengantar perencanaan wilayah dan kota. Gadjah Mada University Press.
- Firman, T. (2002). Urban development in Indonesia, 1990–2001: From the boom to the early reform era through the crisis. *Habitat International*, 26(2), 229–249.
- Friedmann, J. (1968). Education for regional planning in developing countries. *Regional Studies*, 2(1), 131–138. <https://doi.org/10.1080/09595236800185101>
- Gunandha. (2017). Inilah 49 Wilayah Jakarta yang Masih Terendam Banjir. [suara.com. https://www.suara.com/news/2017/02/21/113333/inilah-49-wilayah-jakarta-yang-masih-terendam-banjir](https://www.suara.com/news/2017/02/21/113333/inilah-49-wilayah-jakarta-yang-masih-terendam-banjir)

- Hill, H. (1994). *Indonesia's New Order: The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. University of Hawaii Press.
- Johansen, P. H., & Chandler, T. L. (2015). Mechanisms of power in participatory rural planning. *Journal of Rural Studies*, 40, 12–20. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.05.006>
- kemenlu. (2017). *Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asean Growth Area Bimp Eaga | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. kemenlu.go.id. https://kemlu.go.id/portal/i/list/halaman_list_lainnya/94/brunei-indonesia-malaysia-philippines-east-asean-growth-area-bimp-eaga
- kumparan.com. (2017). *Banjir Terjadi di Area Parkir Pesawat Terminal 3 Bandara Soetta*. kumparan.com. <https://kumparan.com/kumparannews/area-parkir-pesawat-terminal-3-bandara-soetta-banjir>
- Mahi, A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Terori & Aplikasi*. Kencana.
- McCann, P. (2013). *Modern Urban and Regional Economics*. OUP Oxford.
- Moseley, M. J. (2013). *Growth Centres in Spatial Planning: Pergamon Urban and Regional Planning*. Elsevier.
- Muchdie, Alkadri, & Suhandjo. (2001). *3 pilar pengembangan wilayah, sumber daya alam, sumberdaya manusia, teknologi*. Direktorat Kebijakan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.)*. Pearson Education, Limited.
- Nurzaman, S. S. (2002). *Perencanaan wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis*. Penerbit ITB.
- Nurzaman, S. S. (2012). *Perencanaan wilayah dalam konteks Indonesia*. Penerbit ITB.
- O'Sullivan, A. (2011). *Urban Economics (8 ed.)*. McGraw-Hill.
- Pontoh, N. K., & Kustiwan, I. (2009). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Penerbit ITB.
- Prasetia, A. (2016). *Ekonomi Maritim Indonesia*. Diandra Kreatif.
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sari, E. V. (2017). *Penduduk Miskin Bertambah, Tingkat Ketimpangan Stagnan*. cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170717160147-78-228406/penduduk-miskin-bertambah-tingkat-ketimpangan-stagnan>
- Setiono, D. N. S., & Setiyono, P. (2010). *Ekonomi pengembangan wilayah: Teori dan analisis*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Shalaby, N. W. (2013). Multi agent modeling for the participatory planning process. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 105, 851–865. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.087>
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*.
- Sujarto, D. (2006). *Perencanaan pembangunan kota*. Prodi PWK-SAPPK ITB.
- Suryowati, E. (2017). *Bappenas: 400.000 PNS Pusat Bakal "Diangkut" ke Ibu Kota yang Baru*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/22505221/bappenas.400.000.pns.pusat.bakal.diangkut.ke.ibu.kota.yang.baru>
- Tarigan, R. (2012). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Bumi Aksara.
- tomtom.com. (2017). *TomTom Traffic Index*. https://tomtom.com/en_gb/traffic-index/
- Winarso, H., & Firman, T. (2002). Residential land development in Jabotabek, Indonesia: Triggering economic crisis? *Habitat International*, 26(4), 487–506.